



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1543, 2019

BKKBN. Kelas Jabatan. Jabatan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa dengan adanya evaluasi jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menyesuaikan kelas jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/1218/M.SM.04.00/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang persetujuan penetapan usulan perubahan kelas jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. Pegawai di Lingkungan BKKBN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BKKBN.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan.
5. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan pimpinan tinggi;
 - b. Jabatan administrasi; dan
 - c. Jabatan fungsional.

Pasal 3

- (1) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jabatan pimpinan tinggi utama;
 - b. Jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - c. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jabatan administrator;
 - b. Jabatan pengawas; dan
 - c. Jabatan pelaksana.

- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (5) Jenjang Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

Pasal 4

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai dasar penetapan Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi Jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

- (1) Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Jabatan dan kelas jabatan fungsional di lingkungan Badan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Jabatan dan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi Pegawai.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN
 PIMPINAN TINGGI UTAMA, PIMPINAN TINGGI MADYA, PIMPINAN TINGGI
 PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|--|------------------|
| 1. | Kepala | 17 |
| 2. | Sekretaris Utama | 16 |
| 3. | Inspektur Utama | 16 |
| 4. | Deputi Bidang Pengendalian Penduduk | 16 |
| 5. | Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 16 |
| 6. | Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga | 16 |
| 7. | Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi | 16 |
| 8. | Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan | 16 |
| 9. | Kepala Biro Perencanaan | 14 |
| 10. | Kepala Biro Kepegawaian | 14 |
| 11. | Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN | 14 |
| 12. | Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas | 14 |
| 13. | Kepala Biro Umum | 14 |
| 14. | Inspektur Wilayah I | 14 |
| 15. | Inspektur Wilayah II | 14 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|---|------------------|
| 16. | Inspektur Wilayah III | 14 |
| 17. | Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk | 14 |
| 18. | Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk | 14 |
| 19. | Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan | 14 |
| 20. | Direktur Analisis Dampak Kependudukan | 14 |
| 21. | Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah | 14 |
| 22. | Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta | 14 |
| 23. | Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus | 14 |
| 24. | Direktur Kesehatan Reproduksi | 14 |
| 25. | Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak | 14 |
| 26. | Direktur Bina Ketahanan Remaja | 14 |
| 27. | Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan | 14 |
| 28. | Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 14 |
| 29. | Direktur Advokasi dan KIE | 14 |
| 30. | Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga | 14 |
| 31. | Direktur Bina Lini Lapangan | 14 |
| 32. | Direktur Pelaporan dan Statistik | 14 |
| 33. | Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi | 14 |
| 34. | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana | 14 |
| 35. | Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan KB | 14 |
| 36. | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan | 14 |
| 37. | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS | 14 |
| 38. | Kepala Bagian Perencanaan Program | 11 |
| 39. | Kepala Bagian Perencanaan Anggaran | 11 |
| 40. | Kepala Bagian Pengembangan Manajemen Kinerja | 11 |
| 41. | Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Perencanaan | 11 |
| 42. | Kepala Bagian Data dan Perencanaan Pegawai | 11 |
| 43. | Kepala Bagian Pengembangan Pegawai | 11 |
| 44. | Kepala Bagian Penempatan dan Mutasi Pegawai | 11 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|--|------------------|
| 45. | Kepala Bagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai | 11 |
| 46. | Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran | 11 |
| 47. | Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi | 11 |
| 48. | Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara | 11 |
| 49. | Kepala Bagian Pengelolaan Sarana Program | 11 |
| 50. | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan | 11 |
| 51. | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana | 11 |
| 52. | Kepala Bagian Humas | 11 |
| 53. | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol | 11 |
| 54. | Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | 11 |
| 55. | Kepala Bagian Administrasi Umum | 11 |
| 56. | Kepala Subdirektorat Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk | 11 |
| 57. | Kepala Subdirektorat Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk | 11 |
| 58. | Kepala Subdirektorat Profil dan Proyeksi Penduduk | 11 |
| 59. | Kepala Subdirektorat Penetapan Sasaran Pengendalian Penduduk | 11 |
| 60. | Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk | 11 |
| 61. | Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem | 11 |
| 62. | Kepala Subdirektorat Pengembangan Materi | 11 |
| 63. | Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi | 11 |
| 64. | Kepala Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi | 11 |
| 65. | Kepala Subdirektorat Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan | 11 |
| 66. | Kepala Subdirektorat Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | 11 |
| 67. | Kepala Subdirektorat Bina KB Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah | 11 |
| 68. | Kepala Subdirektorat Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana KB | 11 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|---|------------------|
| 69. | Kepala Subdirektorat Kualitas Pelayanan KB Pemerintah | 11 |
| 70. | Kepala Subdirektorat Bina KB Rumah Sakit dan Klinik swasta | 11 |
| 71. | Kepala Subdirektorat Jaminan dan Ketersediaan Sarana KB Swasta | 11 |
| 72. | Kepala Subdirektorat Kualitas Pelayanan KB Swasta | 11 |
| 73. | Kepala Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan KB Galciltas | 11 |
| 74. | Kepala Subdirektorat Akses dan Kualitas Pelayanan KB Wilayah Miskin Perkotaan | 11 |
| 75. | Kepala Subdirektorat Kesertaan KB Pria | 11 |
| 76. | Kepala Subdirektorat Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak | 11 |
| 77. | Kepala Subdirektorat Pencegahan PMS dan HIV/AIDS | 11 |
| 78. | Kepala Subdirektorat Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas | 11 |
| 79. | Kepala Subdirektorat Pengembangan Program Bina Keluarga Balita dan Anak | 11 |
| 80. | Kepala Subdirektorat Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak | 11 |
| 81. | Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak | 11 |
| 82. | Kepala Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja | 11 |
| 83. | Kepala Subdirektorat Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja | 11 |
| 84. | Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja | 11 |
| 85. | Kepala Subdirektorat Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan | 11 |
| 86. | Kepala Subdirektorat Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan | 11 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|--|------------------|
| 87. | Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan | 11 |
| 88. | Kepala Subdirektorat Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga | 11 |
| 89. | Kepala Subdirektorat Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga | 11 |
| 90. | Kepala Subdirektorat Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga | 11 |
| 91. | Kepala Subdirektorat Pengembangan Advokasi dan KIE | 11 |
| 92. | Kepala Subdirektorat Advokasi dan Pencitraan | 11 |
| 93. | Kepala Subdirektorat Komunikasi Informasi dan Edukasi | 11 |
| 94. | Kepala Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi | 11 |
| 95. | Kepala Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota | 11 |
| 96. | Kepala Subdirektorat Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah | 11 |
| 97. | Kepala Subdirektorat Tenaga Lini Lapangan | 11 |
| 98. | Kepala Subdirektorat Institusi Masyarakat Pedesaan | 11 |
| 99. | Kepala Subdirektorat Mekanisme Operasional Lini Lapangan | 11 |
| 100. | Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan | 11 |
| 101. | Kepala Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data | 11 |
| 102. | Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi | 11 |
| 103. | Kepala Subdirektorat Sistem Aplikasi dan Bank Data | 11 |
| 104. | Kepala Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi | 11 |
| 105. | Kepala Subdirektorat Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi | 11 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|---|------------------|
| 106. | Kepala Bidang Program dan Kerjasama Diklat | 11 |
| 107. | Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi | 11 |
| 108. | Kepala Bidang Kerjasama dan Pendidikan Pelatihan Luar Negeri | 11 |
| 109. | Kepala Bidang Pelatihan Internasional | 11 |
| 110. | Kepala Bidang Program dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan | 11 |
| 111. | Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan | 11 |
| 112. | Kepala Bidang Program dan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 11 |
| 113. | Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 11 |
| 114. | Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama | 11 |
| 115. | Kepala Subbagian Perencanaan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 9 |
| 116. | Kepala Subbagian Perencanaan Program Penunjang | 9 |
| 117. | Kepala Subbagian Perencanaan Kerjasama Luar Negeri | 9 |
| 118. | Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran Pengendalian Penduduk | 9 |
| 119. | Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 9 |
| 120. | Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran Penunjang | 9 |
| 121. | Kepala Subbagian Perencanaan Kinerja | 9 |
| 122. | Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja | 9 |
| 123. | Kepala Subbagian Pengembangan Indikator Kinerja | 9 |
| 124. | Kepala Subbagian Data Perencanaan | 9 |
| 125. | Kepala Subbagian Analisis | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|---|------------------|
| 126. | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan | 9 |
| 127. | Kepala Subbagian Data dan Dokumentasi Pegawai | 9 |
| 128. | Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai | 9 |
| 129. | Kepala Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai | 9 |
| 130. | Kepala Subbagian Penilaian Kinerja Pegawai | 9 |
| 131. | Kepala Subbagian Pengembangan Karir Pegawai | 9 |
| 132. | Kepala Subbagian Mutasi Jabatan Pegawai | 9 |
| 133. | Kepala Subbagian Pangkat dan Gaji Pegawai | 9 |
| 134. | Kepala Subbagian Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai | 9 |
| 135. | Kepala Subbagian Kesejahteraan Pegawai | 9 |
| 136. | Kepala Subbagian Disiplin Pegawai | 9 |
| 137. | Kepala Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional | 9 |
| 138. | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran Pengendalian Penduduk | 9 |
| 139. | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 9 |
| 140. | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran Penunjang | 9 |
| 141. | Kepala Subbagian Perbendaharaan | 9 |
| 142. | Kepala Subbagian Akuntansi | 9 |
| 143. | Kepala Subbagian Verifikasi | 9 |
| 144. | Kepala Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara | 9 |
| 145. | Kepala Subbagian Penata Usahaan Barang Milik Negara | 9 |
| 146. | Kepala Subbagian Evaluasi Barang Milik Negara | 9 |
| 147. | Kepala Subbagian Perencanaan Kebutuhan Sarana Program | 9 |
| 148. | Kepala Subbagian Penatausahaan Pengelolaan Sarana Program | 9 |
| 149. | Kepala Subbagian Evaluasi Sarana Program | 9 |
| 150. | Kepala Subbagian Hukum | 9 |
| 151. | Kepala Subbagian Perundang-Undangan | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|---|------------------|
| 152. | Kepala Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan | 9 |
| 153. | Kepala Subbagian Organisasi | 9 |
| 154. | Subbagian Tata Laksana | 9 |
| 155. | Kepala Subbagian Pembakuan | 9 |
| 156. | Kepala Subbagian Hubungan Media Massa | 9 |
| 157. | Kepala Subbagian Analisis Berita dan Pendapat Umum | 9 |
| 158. | Kepala Subbagian Publikasi | 9 |
| 159. | Kepala Subbagian Rumah Tangga | 9 |
| 160. | Kepala Subbagian Keamanan dan Lingkungan | 9 |
| 161. | Kepala Subbagian Protokol | 9 |
| 162. | Kepala Subbagian Persuratan | 9 |
| 163. | Kepala Subbagian Arsip dan Dokumentasi | 9 |
| 164. | Kepala Subbag TU Pimpinan Sekretariat Utama | 9 |
| 165. | Kepala Subbag TU Pimpinan Inspektorat Utama | 9 |
| 166. | Kepala Subbag TU Pimpinan Kedeputian bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 9 |
| 167. | Kepala Subbag TU Pimpinan Kedeputian bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga | 9 |
| 168. | Kepala Subbag TU Pimpinan Kedeputian bidang Pengendalian Penduduk | 9 |
| 169. | Kepala Subbag TU Pimpinan Sekretariat Kedeputian bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi | 9 |
| 170. | Kepala Subbag TU Pimpinan Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan | 9 |
| 171. | Kepala Subbagian Pemeliharaan Gedung | 9 |
| 172. | Kepala Subbagian Pemeliharaan Peralatan | 9 |
| 173. | Kepala Subbagian Pemeliharaan Kendaraan | 9 |
| 174. | Kasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk | 9 |
| 175. | Kasi Evaluasi dan Pelaporan Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk | 9 |
| 176. | Kepala Seksi Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Penduduk | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|--|------------------|
| 177. | Kepala Seksi Penyiapan Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk | 9 |
| 178. | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk | 9 |
| 179. | Kepala Seksi Analisis Data Profil dan Proyeksi Penduduk | 9 |
| 180. | Kepala Seksi Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk | 9 |
| 181. | Kepala Seksi Penetapan Sasaran Parameter Pengendalian Kepala Penduduk | 9 |
| 182. | Kepala Seksi Evaluasi Sasaran Parameter Pengendalian Penduduk | 9 |
| 183. | Kepala Seksi Pemanfaatan Profil dan Proyeksi Pengendalian Penduduk | 9 |
| 184. | Kepala Seksi Pemanfaatan Parameter Pengendalian Penduduk | 9 |
| 185. | Kepala Seksi Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal | 9 |
| 186. | Kepala Seksi Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal | 9 |
| 187. | Kepala Seksi Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal | 9 |
| 188. | Kepala Seksi Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal | 9 |
| 189. | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal | 9 |
| 190. | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal | 9 |
| 191. | Kepala Seksi Analisis Sosial | 9 |
| 192. | Kepala Seksi Analisis Ekonomi | 9 |
| 193. | Kepala Seksi Analisis Politik | 9 |
| 194. | Kepala Seksi Analisis Pertahanan dan Keamanan | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|--|------------------|
| 195. | Kepala Seksi Analisis Daya Dukung Lingkungan | 9 |
| 196. | Kepala Seksi Analisis Daya Tampung Lingkungan | 9 |
| 197. | Kepala Seksi Bina KB Rumah Sakit Pemerintah | 9 |
| 198. | Kepala Seksi Bina KB Klinik Pemerintah | 9 |
| 199. | Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB | 9 |
| 200. | Kepala Seksi Penyediaan Sarana KB | 9 |
| 201. | Kepala Seksi Standardisasi Pelayanan KB Pemerintah | 9 |
| 202. | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KB Pemerintah | 9 |
| 203. | Kepala Seksi Bina KB Rumah Sakit Swasta | 9 |
| 204. | Kepala Seksi Bina KB Klinik Swasta | 9 |
| 205. | Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB Swasta | 9 |
| 206. | Kepala Seksi Penyediaan Sarana KB Swasta | 9 |
| 207. | Kepala Seksi Standardisasi Pelayanan KB Swasta | 9 |
| 208. | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KB Swasta | 9 |
| 209. | Kepala Seksi Peningkatan Akses Pelayanan KB Galciltas | 9 |
| 210. | Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Galciltas | 9 |
| 211. | Kepala Seksi Peningkatan Akses Pelayanan KB Wilayah Miskin Perkotaan | 9 |
| 212. | Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Wilayah Miskin Perkotaan | 9 |
| 213. | Kepala Seksi Peningkatan Akses KB Pria | 9 |
| 214. | Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi KB Pria | 9 |
| 215. | Kepala Seksi Kelangsungan Hidup Ibu | 9 |
| 216. | Kepala Seksi Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak | 9 |
| 217. | Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Seksual | 9 |
| 218. | Kepala Seksi Pencegahan HIV dan AIDS | 9 |
| 219. | Kepala Seksi Pencegahan Kanker Alat Reproduksi | 9 |
| 220. | Kepala Seksi Penanggulangan Infertilitas | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|--|------------------|
| 221. | Kepala Seksi Pengembangan Program Bina Keluarga Balita | 9 |
| 222. | Kepala Seksi Pengembangan Program Bina Keluarga Anak | 9 |
| 223. | Kepala Seksi Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak | 9 |
| 224. | Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga Balita dan Anak | 9 |
| 225. | Kepala Seksi Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak | 9 |
| 226. | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak | 9 |
| 227. | Kepala Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan | 9 |
| 228. | Kepala Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat | 9 |
| 229. | Kepala Seksi Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan | 9 |
| 230. | Kepala Seksi Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat | 9 |
| 231. | Kepala Seksi Monitoring Bina Ketahanan Remaja | 9 |
| 232. | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja | 9 |
| 233. | Kepala Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia | 9 |
| 234. | Kepala Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan | 9 |
| 235. | Kepala Seksi Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Lansia dan Rentan | 9 |
| 236. | Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga Lansia dan Rentan | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|---|------------------|
| 237. | Kepala Seksi Monitoring Bina Keluarga Lansia dan Rentan | 9 |
| 238. | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan | 9 |
| 239. | Kepala Seksi Penyusunan Program Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga | 9 |
| 240. | Kepala Seksi Evaluasi Program Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga | 9 |
| 241. | Kepala Seksi Informasi dan Peningkatan Teknologi Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga | 9 |
| 242. | Kepala Seksi Pengembangan Permodalan dan Kemitraan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga | 9 |
| 243. | Kepala Seksi Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga | 9 |
| 244. | Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga | 9 |
| 245. | Kepala Seksi Perencanaan Advokasi dan KIE | 9 |
| 246. | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan KIE | 9 |
| 247. | Kepala Seksi Advokasi | 9 |
| 248. | Kepala Seksi Pencitraan | 9 |
| 249. | Kepala Seksi Promosi | 9 |
| 250. | Kepala Seksi Sarana Produksi Media Komunikasi | 9 |
| 251. | Kepala Seksi Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat | 9 |
| 252. | Kepala Seksi Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Provinsi | 9 |
| 253. | Kepala Seksi Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota | 9 |
| 254. | Kepala Seksi Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|--|------------------|
| 255. | Kepala Seksi Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah | 9 |
| 256. | Kepala Seksi Penguatan Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah | 9 |
| 257. | Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Lini Lapangan | 9 |
| 258. | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan | 9 |
| 259. | Kepala Seksi Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan | 9 |
| 260. | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan | 9 |
| 261. | Kepala Seksi Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan | 9 |
| 262. | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan | 9 |
| 263. | Kepala Seksi Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan | 9 |
| 264. | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan | 9 |
| 265. | Kepala Seksi Pengumpulan Data | 9 |
| 266. | Kepala Seksi Pengolahan Data | 9 |
| 267. | Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk | 9 |
| 268. | Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi KB dan KS | 9 |
| 269. | Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi | 9 |
| 270. | Kepala Seksi Pengelolaan Bank Data | 9 |
| 271. | Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Tehnologi Informasi | 9 |
| 272. | Kepala Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Tehnologi Informasi | 9 |
| 273. | Kepala Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan | 9 |
| 274. | Kepala Seksi Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|--|------------------|
| 275. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana | 9 |
| 276. | Kepala Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan | 9 |
| 277. | Kepala Subbidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan | 9 |
| 278. | Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 9 |
| 279. | Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan | 9 |
| 280. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana | 9 |
| 281. | Kepala Subbidang Kerjasama Luar Negeri | 9 |
| 282. | Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri | 9 |
| 283. | Kepala Subbidang Perencanaan dan Pemasaran | 9 |
| 284. | Kepala Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi | 9 |
| 285. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan | 9 |
| 286. | Kepala Subbidang Penyusunan Program | 9 |
| 287. | Kepala Subbidang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan | 9 |
| 288. | Kepala Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian | 9 |
| 289. | Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan | 9 |
| 290. | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 9 |
| 291. | Kepala Subbidang Penyusunan Program | 9 |
| 292. | Kepala Subbidang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|---|------------------|
| 293. | Kepala Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian | 9 |
| 294. | Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan | 9 |
| 295. | Kepala Subbagian Administrasi Pengawasan | 9 |
| 296. | Kepala Subbagian Administrasi Umum | 9 |

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|---|------------------|
| 1. | Kepala Perwakilan BKKBN (Tipe A) | 14 |
| 2. | Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 3. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 4. | Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 5. | Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 6. | Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 7. | Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 8. | Kepala Subbagian Perencanaan Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 9. | Kepala Subbagian Umum dan Humas Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 10. | Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|--|------------------|
| 11. | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 12. | Kepala Subbagian Administrasi Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 13. | Kepala Subbidang Penyusunan Parameter Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 14. | Kepala Subbidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 15. | Kepala Subbidang Analisis Dampak Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 16. | Kepala Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 17. | Kepala Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 18. | Kepala Subbidang Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 19. | Kepala Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lansia Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 20. | Kepala Subbidang Bina Ketahanan Remaja Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 21. | Kepala Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 22. | Kepala Subbidang Advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 23. | Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 24. | Kepala Subbidang Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 25. | Kepala Subbidang Tata Operasional Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 26. | Kepala Subbidang Program dan Kerjasama Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|--|------------------|
| 27. | Kepala Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 28. | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi (Tipe B) | 14 |
| 29. | Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 30. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 31. | Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 32. | Kepala Bidang Advokasi, Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi | 11 |
| 33. | Kepala Subbagian Perencanaan Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 34. | Kepala Subbagian Umum Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 35. | Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelolaan BMN Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 36. | Kepala Subbagian Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 37. | Kepala Subbidang Bina Ketahanan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 38. | Kepala Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 39. | Kepala Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 40. | Kepala Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 41. | Kepala Subbidang Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 42. | Kepala Subbidang Penggerakan, Advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 43. | Kepala Subbidang Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|--|------------------|
| 44. | Kepala Subbidang Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi | 9 |
| 45. | Kepala Balai Diklat | 11 |
| 46. | Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat | 9 |
| 47. | Kepala Seksi Program dan Kerjasama Balai Diklat | 9 |
| 48. | Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi Balai Diklat | 9 |

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1. | Auditor Utama | 11 |
| 2. | Auditor Madya | 11 |
| 3. | Auditor Muda | 9 |
| 4. | Auditor Pertama | 8 |
| 5. | Auditor Penyelia | 8 |
| 6. | Auditor Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 7. | Auditor Pelaksana | 6 |
| 8. | Widyaiswara Utama | 11 |
| 9. | Widyaiswara Madya | 11 |
| 10. | Widyaiswara Muda | 9 |
| 11. | Widyaiswara Pertama | 8 |
| 12. | Peneliti Utama | 11 |
| 13. | Peneliti Madya | 11 |
| 14. | Peneliti Muda | 9 |
| 15. | Peneliti Pertama | 8 |
| 16. | Pustakawan Madya | 11 |
| 17. | Pustakawan Muda | 9 |
| 18. | Pustakawan Pertama | 8 |
| 19. | Pustakawan Penyelia | 8 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|--|------------------|
| 20. | Pustakawan Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 21. | Pustakawan Pelaksana | 6 |
| 22. | Arsiparis Madya | 11 |
| 23. | Arsiparis Muda | 9 |
| 24. | Arsiparis Pertama | 8 |
| 25. | Arsiparis Penyelia | 8 |
| 26. | Arsiparis Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 27. | Arsiparis Pelaksana | 6 |
| 28. | Pranata Komputer Madya | 11 |
| 29. | Pranata Komputer Muda | 9 |
| 30. | Pranata Komputer Pertama | 8 |
| 31. | Pranata Komputer Penyelia | 8 |
| 32. | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 33. | Pranata Komputer Pelaksana | 6 |
| 34. | Pranata Komputer Pelaksana Pemula | 5 |
| 35. | Analisis Kepegawaian Madya | 11 |
| 36. | Analisis Kepegawaian Muda | 9 |
| 37. | Analisis Kepegawaian Pertama | 8 |
| 38. | Analisis Kepegawaian Penyelia | 8 |
| 39. | Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 40. | Analisis Kepegawaian Pelaksana | 6 |
| 41. | Pranata Hubungan Masyarakat Madya | 11 |
| 42. | Pranata Hubungan Masyarakat Muda | 9 |
| 43. | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | 8 |
| 44. | Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia | 8 |
| 45. | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 46. | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana | 6 |
| 47. | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula | 5 |
| 48. | Statistisi Madya | 11 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|---|------------------|
| 49. | Statistisi Muda | 9 |
| 50. | Statistisi Pertama | 8 |
| 51. | Statistisi Penyelia | 8 |
| 52. | Statistisi Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 53. | Statistisi Pelaksana | 6 |
| 54. | Perencana Pertama | 8 |
| 55. | Perancang Peraturan Perundang undangan Pertama | 8 |
| 56. | Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya | 11 |
| 57. | Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda | 9 |
| 58. | Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama | 8 |
| 59. | Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Penyelia | 8 |
| 60. | Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 |
| 61. | Penyuluh Keluarga Berencana Berencana Terampil Pelaksana Lanjutan | 6 |
| 62. | Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Pemula | 5 |

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|--|------------------|
| 1. | Bendaharawan | 8 |
| 2. | Perancang Peraturan Perundang-undangan | 8 |
| 3. | Analisis | 7 |
| 4. | Penyusun Bahan | 6 |
| 5. | Pengevaluasi | 6 |
| 6. | Penghubung Lembaga | 6 |
| 7. | Penerjemah | 6 |
| 8. | Pembantu Bendahara | 6 |
| 9. | Pengadministrasi | 5 |
| 10. | Sekretaris Pimpinan | 5 |
| 11. | Verifikator Keuangan | 5 |
| 12. | Penata Laporan Keuangan | 5 |
| 13. | Penginventarisasi | 5 |
| 14. | Pengelola Barang Inventaris | 4 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|-----------------|------------------|
| 15. | Pemelihara | 3 |
| 16. | Pengumpul Bahan | 1 |

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN BADAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|----------------------------|------------------|
| 63. | Auditor Utama | 11 |
| 64. | Auditor Madya | 11 |
| 65. | Auditor Muda | 9 |
| 66. | Auditor Pertama | 8 |
| 67. | Auditor Penyelia | 8 |
| 68. | Auditor Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 69. | Auditor Pelaksana | 6 |
| 70. | Widyaiswara Utama | 11 |
| 71. | Widyaiswara Madya | 11 |
| 72. | Widyaiswara Muda | 9 |
| 73. | Widyaiswara Pertama | 8 |
| 74. | Peneliti Utama | 11 |
| 75. | Peneliti Madya | 11 |
| 76. | Peneliti Muda | 9 |
| 77. | Peneliti Pertama | 8 |
| 78. | Pustakawan Madya | 11 |
| 79. | Pustakawan Muda | 9 |
| 80. | Pustakawan Pertama | 8 |
| 81. | Pustakawan Penyelia | 8 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|--|------------------|
| 82. | Pustakawan Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 83. | Pustakawan Pelaksana | 6 |
| 84. | Arsiparis Madya | 11 |
| 85. | Arsiparis Muda | 9 |
| 86. | Arsiparis Pertama | 8 |
| 87. | Arsiparis Penyelia | 8 |
| 88. | Arsiparis Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 89. | Arsiparis Pelaksana | 6 |
| 90. | Pranata Komputer Madya | 11 |
| 91. | Pranata Komputer Muda | 9 |
| 92. | Pranata Komputer Pertama | 8 |
| 93. | Pranata Komputer Penyelia | 8 |
| 94. | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 95. | Pranata Komputer Pelaksana | 6 |
| 96. | Pranata Komputer Pelaksana Pemula | 5 |
| 97. | Analisis Kepegawaian Madya | 11 |
| 98. | Analisis Kepegawaian Muda | 9 |
| 99. | Analisis Kepegawaian Pertama | 8 |
| 100. | Analisis Kepegawaian Penyelia | 8 |
| 101. | Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 102. | Analisis Kepegawaian Pelaksana | 6 |
| 103. | Pranata Hubungan Masyarakat Madya | 11 |
| 104. | Pranata Hubungan Masyarakat Muda | 9 |
| 105. | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | 8 |
| 106. | Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia | 8 |
| 107. | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 108. | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana | 6 |
| 109. | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula | 5 |
| 110. | Statistisi Madya | 11 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|------|---|------------------|
| 111. | Statistisi Muda | 9 |
| 112. | Statistisi Pertama | 8 |
| 113. | Statistisi Penyelia | 8 |
| 114. | Statistisi Pelaksana Lanjutan | 7 |
| 115. | Statistisi Pelaksana | 6 |
| 116. | Perencana Pertama | 8 |
| 117. | Perancang Peraturan Perundang undangan Pertama | 8 |
| 118. | Penyuluh Keluarga Berencana Madya | 11 |
| 119. | Penyuluh Keluarga Berencana Muda | 9 |
| 120. | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | 8 |
| 121. | Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Penyelia | 8 |
| 122. | Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 |
| 123. | Penyuluh Keluarga Berencana Berencana Terampil Pelaksana Lanjutan | 6 |
| 124. | Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Pemula | 5 |

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|--|------------------|
| 17. | Bendaharawan | 8 |
| 18. | Perancang Peraturan Perundang-undangan | 8 |
| 19. | Analisis | 7 |
| 20. | Penyusun Bahan | 6 |
| 21. | Pengevaluasi | 6 |
| 22. | Penghubung Lembaga | 6 |
| 23. | Penerjemah | 6 |
| 24. | Pembantu Bendahara | 6 |
| 25. | Pengadministrasi | 5 |
| 26. | Sekretaris Pimpinan | 5 |
| 27. | Verifikator Keuangan | 5 |
| 28. | Penata Laporan Keuangan | 5 |
| 29. | Penginventarisasi | 5 |
| 30. | Pengelola Barang Inventaris | 4 |

| NO | JABATAN | KELAS JABATAN |
|-----|-----------------|------------------|
| 31. | Pemelihara | 3 |
| 32. | Pengumpul Bahan | 1 |

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HASTO WARDOYO